

Evolusi dan Adaptasi Gerakan Kebangsaan Orang Papua: dari Nasionalisme ke Etnonasionalisme

Margaretha Hanita

Sekolah Tinggi Intelijen Negara

E-mail: margaretha.hanita@gmail.com

Abstract

Papuan ethnonationalism is the oldest Papuan nationalist movement that arose when outsiders began arriving in Papua with the intention to control the region, since the arrival of Protestant and Catholic missionaries, the presence of Dutch, Japanese and Indonesian Indies. There are five roots that have fostered Papuan ethnonationalism that have evolved to the present: the roots of the Melanesian race, the roots of local religions, the roots of indigenous ties, the roots of the formation of government and political elites in the Dutch East Indies era, and the roots of Feelings of being deprived/uprooted from their own land economic exploitation. Papuan ethnonationalism was transformed into Papuan Nationalism which was formed by the Dutch East Indies Government which was intended so that West Papua would not become part of the Republic of Indonesia and become an independent state in the process of decolonization carried out by the Dutch in West Papua. But after Indonesia succeeded in taking over West Papua, the Papuan Nationalism was transformed back into Ethnonationalism, the symptoms of which have strengthened in the last two decades. This symptom of ethnonationalism strengthens the resilience of the Papua independence movement on the one hand and weakens Indonesia's national resilience on the other. Papuan ethnonationalism is identical with theories about ethnonationalism and the characteristics of Kurdish and Tamil ethnonationalism.

Keywords: *Ethnonationalism, primordialism, identity, independence, resilience.*

Etnonasionalisme Papua adalah gerakan kebangsaan Papua yang paling tua umurnya yang timbul ketika orang-orang luar mulai berdatangan ke Papua dengan maksud untuk menguasai wilayah itu, sejak kedatangan misionaris Protestan dan Katolik, kehadiran pemerintah Hindia Belanda, Jepang dan Indonesia. Ada lima akar yang menumbuhkan etnonasionalisme Papua yang berkembang hingga kini yakni: akar ras Melanesia, akar agama-agama lokal, akar ikatan adat, akar pembentukan elite pemerintahan dan politik di zaman Hindia Belanda, dan akar Perasaan terampas/tercerabut dari tanahnya sendiri/eksploitasi ekonomi. Etnonasionalisme Papua bertransformasi menjadi Nasionalisme Papua yang dibentuk oleh Pemerintah Hindia Belanda yang dimaksudkan agar Papua Barat tidak menjadi bagian dari Republik Indonesia dan menjadi negara merdeka dalam proses dekolonisasi yang dijalankan oleh Belanda di Papua Barat. Namun setelah Indonesia berhasil mengambilalih Papua Barat, maka Nasionalisme Papua bertransformasi kembali dalam Etnonasionalisme yang gejalanya semakin menguat dalam dua dekade terakhir ini. Gejala Etnonasionalisme ini mem-

perkuat ketahanan gerakan kemerdekaan Papua di satu sisi dan melemahkan ketahanan nasional Indonesia di sisi lain. Karakteristik etnonasionalisme Papua identik dengan teori-teori tentang etnonasionalisme dan karakteristik etnonasionalisme Kurdi dan Tamil.

Kata Kunci: Etnonasionalisme, primordialisme, identitas, kemerdekaan, ketahanan.

Pendahuluan

Etnonasionalisme Papua, salah satunya berakar pada gerakan keagamaan setempat. Penelitian yang saya mulai sejak 2005 tentang Koreri, gerakan keagamaan di Biak, pulau-pulau lainnya di Teluk Cendrawasih dan komunitas migran Biak di Kepulauan Raja Ampat dan Jayapura memberikan keyakinan bahwa gerakan politik kemerdekaan Papua, terutama gerakan politik orang Biak, dipengaruhi oleh gerakan Koreri. Koreri adalah gerakan keagamaan asli Biak yang mendambakan kehidupan *kandomowoser*, kehidupan yang penuh kebahagiaan, di mana orang bisa hidup sejahtera bersama-sama, tanpa penderitaan dan tanpa penjajahan bangsa lain. Nabi Koreri bernama Manarmakeri yang diyakini akan kembali ke Biak membawa *kandomowoser*.¹ Gerakan keagamaan Koreri adalah gerakan mesianistik, gerakan ratu adil yang mendambakan kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan sekarang ini. Gerakan Koreri patah tumbuh melawan pendudukan Belanda dan Jepang, juga melakukan perlawanan terhadap Indonesia melalui pengaruhnya pada tokoh-tokoh masyarakat yang menginginkan kemerdekaan Papua.

Menurut para tokoh masyarakat Biak yang saya wawancarai semua orang Biak adalah penganut Koreri. Dengan demikian, Koreri adalah sumber nasionalisme atau barangkali lebih tepatnya etnonasionalisme orang Biak. Selain Koreri, gerakan keagamaan lain yang juga berhaluan mesianistik adalah Hai, gerakan keagamaan orang-orang suku Amungme. Gerakan Hai melakukan perlawanan terhadap Belanda dan Freeport McMoran yang menambang emas dan tembaga di gunung milik mereka. Hai atau Zaman Bahagia (Bahasa Amungme), adalah gerakan yang menginginkan kedatangan Zaman Bahagia, di mana orang Amungme bisa hidup sejahtera dan tidak ada penderitaan dan kematian lagi. Wawancara saya dengan Tom Beanal dan tokoh-tokoh amungme dan Mee (suku tetangga Amungme) untuk disertasi saya membawa saya pada kesimpulan bahwa Hai menginginkan kemerdekaan dan menjadi akar nasionalisme atau lebih

¹ Margaretha Hanita, *Cita-Cita Koreri, Gerakan Politik Orang Papua*. (Jakarta: UI Publishing, 2019)

tepatnya etnonasionalisme Amungme. Masih banyak lagi gerakan-gerakan keagamaan serupa di berbagai suku di Papua seperti Wege Bege, Kasiep, Simson dan lain-lain yang semuanya merupakan gerakan keagamaan mesianistik yang mendambakan zaman kebahagiaan.

Etnonasionalisme yang dikobarkan oleh gerakan-gerakan keagamaan setempat inilah yang selalu mendorong gerakan kemerdekaan Papua yang dimaksudkan untuk menghadirkan *Kandomowoser* dan Zaman Bahagia. Penghinaan-penghinaan dan diskriminasi etnis yang diderita oleh orang-orang Papua, seperti baru-baru ini yang memicu aksi-aksi protes untuk kemerdekaan, bukanlah akar penyebab utama gerakan kemerdekaan dimaksud.

Selain gerakan keagamaan tersebut di atas, masih ada akar-akar etnonasionalisme Papua lainnya seperti ikatan ras Melanesia, ikatan adat, perasaan tercerabut/tersingkirkan secara kultural, sosial dan ekonomi dan lain-lain (lihat Tabel 2).

Kajian Pustaka

Membahas akar etnonasionalisme Papua layak diajukan pandangan nasionalisme yang berhimpitan dengan etnonasionalisme yang dikemukakan oleh Josep R. Llobera. Ia, dalam hal teori universalisme tentang nasionalisme, mengajukan pendekatan perspektif primordialis dan sosiobiologis untuk menilai lahirnya nasionalisme.² Primordialisme mengasumsikan bahwa identitas kelompok adalah suatu karunia (*given*) dan ada di semua masyarakat tertentu, ikatan primordial, irasional tertentu berdasarkan darah, ras, bahasa, agama, wilayah, dan lain-lain. Megutip Clifford Geertz,³ Llobera menekankan primordialisisme adalah ikatan yang tak terlukiskan namun koersif, yang merupakan hasil dari proses kristalisasi yang panjang di mana di negara-negara modern, khususnya, tetapi tidak secara eksklusif, di Dunia Ketiga, ditumpangkan pada realitas primordial yang merupakan kelompok etnis atau komunitas.⁴

Menurut Llobera, kaum primordialis percaya bahwa identitas etnis berakar dalam pengalaman historis umat manusia sampai-sampai secara praktis diberikan dan pandangan sosiobiologis menegaskan primordialisisme sebagai karakter biologis etnis.⁵ Pendekatan sosiobiologis dimulai dengan asumsi bahwa nasionalisme adalah hasil dari perluasan seleksi kerabat ke ruang lingkup yang lebih luas

² Josep R. Llobera "Recent Theories of Nationalism". Working Paper ,No. 164, Institut de Ciències Polítiques i Sosial Barcelona (1999).

³ Clifford Geertz .The Interpretation of Cultures. (New York, Free Press, 1973)

⁴ *Ibid.*, 1.

⁵ *Ibid.*, 1.

dari individu yang didefinisikan dalam hal keturunan (determinisme genetik).⁶ Pendekatan sosiobiologis, menurut Llobera, menegaskan bahwa nasionalisme menggabungkan unsur-unsur rasional dan irasional yang merupakan pikiran primitif dengan teknik-teknik modern di mana kata nasionalisme mengungkapkan realitas yang berbeda: cinta terhadap negara, penegasan identitas nasional dan martabat nasional, tetapi juga obsesi xenophobia (anti orang asing) untuk memperoleh hal-hal ini melalui kekerasan dan mengorbankan negara lain.⁷

Namun jauh sebelum para ahli di atas menulis tentang nasionalisme yang dikaitkan dengan primordialisme, Walker Connor⁸ sudah menulis tentang etnonasionalisme. Ia adalah ilmuwan pertama yang memunculkan etnonasionalisme. Connor menggunakan etnonasionalisme untuk mengatasi kekacauan pemahaman antara kelompok etnis dan bangsa dalam konteks nasionalisme. Connor mendefinisikan bangsa sebagai kelompok etnis yang memiliki kesadaran atas identitasnya. Menurut Connor suatu kelompok etnis dapat dengan mudah dilihat oleh pengamat luar, tetapi sampai para anggotanya sendiri menyadari identitas kelompok tersebut, itu hanyalah sebuah kelompok etnis dan bukan suatu bangsa.⁹ Kelompok etnis dan bangsa adalah sama. Mengingat persamaan antara kelompok etnis dan bangsa dalam arti objektif, Connor menggunakan istilah etnonasionalisme secara bergantian dengan nasionalisme.¹⁰ Connor menggunakan etnonasionalisme karena istilah nasionalisme, yang harus mengacu pada kesetiaan kepada kelompok etnis, telah secara umum dan keliru digunakan untuk makna kesetiaan kepada negara.¹¹ Etnonasionalisme Connor menunjukkan pemahaman tentang suatu kelompok etnis yang setia kepada suatu bangsa yang dirampas dari negaranya sendiri.

Anthony D. Smith menggunakan istilah nasionalisme etnis untuk mengidentifikasi perasaan identitas nasionalisme pada kelompok etnis. Menurut Smith, nasionalisme etnis muncul ketika sebuah kelompok etnis berrubah menjadi sebuah bangsa. Ketika nasionalisme etnis dipolitisasi muncul tuntutan untuk otonomi, yang merupakan salah satu komponen kebangsaan¹² dan politisasi berikutnya mengarah

⁶ *Ibid.*, 2.

⁷ *Ibid.*, 2.

⁸ Walker Connor. "The politics of ethnonationalism," *Journal of International Affairs*, Vol. 27, No. 1, (1973)

⁹ Walker Connor. "The politics of ethnonationalism," *Journal of International Affairs*, Vol. 27, No. 1, (1973), 2.

¹⁰ Ma Shu Yun. "Ethnonationalism, ethnic nationalism, and mini-nationalism: A comparison of Connor, Smith and Snyder". *Ethnic and Racial Studies*, 13: 4, (1990), 528.

¹¹ Walker Connor "Nation-building or nation-destroying?" *World Politics*, Vol. 24, No. 3, (1972), 4.

¹² Anthony D. Smith "Introduction: the formation of nationalist movements", dalam Anthony D. Smith (ed.) *Nationalist Movements*. (London, Macmillan, 1976).

pada perjuangan kemerdekaan yang menurut Smith, dapat berupa gerakan pemisahan diri, diaspora, *irredentisme*.¹³ Keberhasilan gerakan kemerdekaan menurut Smith menghasilkan pembentukan negara yang berdaulat dan gagasan-gagasan politik nasionalisme etnis ini terus berlanjut. Jadi, menurut Smith nasionalisme etnis bukan sub-nasionalisme atau nasionalisme yang belum berkembang.¹⁴

James G. Kellas memberi pemahaman tentang etnonasionalisme yang berbeda namun lebih tepat sasaran. Ia menjelaskan etnonasionalisme sebagai nasionalisme pada kelompok-kelompok etnis yang mendefinisikan bangsa mereka secara eksklusif. Misalnya orang Kurdi, Latvia dan Tamil. Dalam tipe nasionalisme seperti ini seseorang tidak bisa menjadi orang Kurdi, Latvia dan Tamil tanpa menjadi orang Kurdi, Latvia dan Tamil. Kewarganegaraan tidak tersedia bagi orang-orang yang tidak beretnis Kurdi, Latvia dan Tamil.¹⁵ Sehubungan dengan nasionalisme dan etnonasionalisme, Kellas merumuskan Teori Deprivasi (Keterampasan) Relatif yang menjelaskan bahwa kebanyakan bangsa minoritas merasa bahwa kebudayaan mereka berada di bawah ancaman negara yang biasanya didominasi oleh kebudayaan bangsa mayoritas. Hal ini menimbulkan perasaan keterampasan budaya di antara bangsa-bangsa minoritas dalam negara bangsa tersebut. Kellas menjelaskan bahwa Deprivasi Relatif berhubungan erat dengan nasionalisme, dan bisa berbentuk deprivasi politik, ekonomi dan deprivasi budaya.

Menurut Kellas, deprivasi budaya dalam konteks nasionalisme adalah pengalaman-pengalaman dalam hal diskriminasi atau penghinaan yang terjadi baik terhadap identitas nasional seseorang, bahasa (termasuk aksen), agama, kebiasaan, cita rasa dan lain-lain. Kejadian-kejadian diskriminasi dan penghinaan tersebut menurut Kellas terjadi berulang-ulang, tentu saja, berlangsung dalam kontak langsung antara kelompok nasional dominan dan kelompok nasional yang didominasi, juga dalam pengalaman kolektif kelompok yang didominasi tersebut, antara lain dalam hal penggunaan bahasa atau pendidikan yang secara resmi dipaksakan kepada semua warganegara oleh negara. Kebijakan-kebijakan seperti ini dijalankan oleh negara dengan undang-undang dan regulasi lainnya. Semua ini mengarahkan pada perasaan deprivasi budaya dan perampasan atau pencabutan budaya jenis ini setidaknya penting untuk menjelaskan perilaku nasionalisme

¹³ Irredentisme mengacu pada kebijakan negara yang ditujukan untuk mencaplok wilayah yang berdekatan dan dengan persamaan etnis, termasuk bahasa, di negara-negara tetangga, seperti Rusia menganeksasi Crimea pada 2014.

¹⁴ Anthony D. Smith, *Theories of Nationalism*. (London : Gerald Duckworth, 1971)

¹⁵ James G. Kellas *The Politics of Nationalism and Ethnicity*. St Martin's Press, Inc., (1998), 66.

sebagaimana juga dalam hal deprivasi ekonomi relatif.”¹⁶

Kellas menjelaskan perampasan relatif dalam hal hubungan ekonomi yakni:

“Masyarakat dalam suatu negara atau wilayah yang merasa terdeprivasi secara relatif karena situasi ekonomi yang sedemikian rupa dapat menjadi kegelisahan politik. Kelompok masyarakat ini mungkin menuntut perubahan atas perasaan terdeprivasi ini. Di pihak lain, kelompok masyarakat ini bisa saja berdiam diri; mereka mungkin lebih suka beremigrasi sebagai tindakan pemberontakan, dan mereka mungkin menjadi fatalis..... Dengan demikian, sebuah kelompok etnis yang tidak kuat secara politik akan memberontak dan mencoba mengubah posisi politiknya. Jika perubahan-perubahan kebijakan-kebijakan ekonomi memaksa sebuah kelompok etnis yang berkuasa membagi kekuasaan politik, konflik-konflik tak mungkin terjadi. Bagaimanapun, di mana kelompok-kelompok etnis memperoleh keuntungan ekonomi atau sebaliknya kehilangan kekuasaan ekonomi, sementara kekuasaan politik mereka tetap atau bergerak ke arah sebaliknya, nasionalisme akan berkembang.”¹⁷

Pemikiran tentang etnonasionalisme lebih baru dikemukakan Barbara Harff dan Ted Robert Gurr yang menjelaskan bahwa para etnonasionalis merupakan kelompok yang relatif besar dan regional, mereka terkonsentrasi pada kelompok etnis yang hidup dalam batas-batas satu negara atau beberapa negara yang berdekatan, gerakan politik modern mereka diarahkan untuk mencapai otonomi yang lebih besar atau negara yang independen.¹⁸ Sebagian besar memiliki tradisi sejarah otonomi atau gerakan kemerdekaan yang digunakan untuk membenarkan tuntutan politik mereka.¹⁹

Tumbuhnya Etno-Nasionalisme Papua

Dari penelitian longitudinal²⁰ sederhana yang saya lakukan tentang gerakan kultural, sosial dan politik di Papua (2005-2019)

¹⁶ Ibid., 88.

¹⁷ Ibid., 78-79.

¹⁸ Barbara Harff dan Ted Robert Gur, *Ethnic Conflict in World Politics*, (London: Routledge, 2000), 23.

¹⁹ Ibid., 23.

²⁰ Penelitian sosial dalam waktu yang panjang yang membandingkan objek penelitian dalam satu periode ke periode tertentu.

menemukan gejala-gejala etnonasionalisme di kalangan orang-orang Papua yang bisa dibaca dalam Tabel 2. Tapi sebelum membahas lima akar etnonasionalisme Papua, terlebih dahulu kita baca Tabel 1 tentang temuan-temuan gejala etnonasionalisme para peneliti sebelumnya.

Tabel 1. Temuan-temuan Gejala Etnonasionalisme Papua

Peneliti	Diskripsi Etnonasionalisme
George Junus Aditjondro (1993). "Bintang Kejora di Tengah Kegelapan Malam: Penggelapan Nasionalisme Orang Irian dalam Historiografi Indonesia". Makalah Seminar, Yayasan Bina Darma.	Ada tiga kelompok besar faham kebangsaan yang hidup di kalangan orang Papua, yaitu (a) faham kebangsaan suku (etno nasionalisme); (b) faham kebangsaan "Merah Putih"; dan (c) faham kebangsaan Papua. Kelompok pertama adalah faham kebangsaan yang diundang di Papua Barat.
Benny Giay (2001). "Nasionalisme Papua Berkembang Alamiiah" situs Radio Hilversum, 26 Januari 2001.	Nasionalisme Papua, terdiri dari tiga unsur: kesadaran etnik ke-Papua-an, protes besar terhadap Orde Baru, dan protes terhadap permainan dunia luar.
Richard Chauvel (2005) <i>Constructing Papuan Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation</i> . Policy Studies 14, Washington's East-West Center	Ketika nasionalisme Papua telah tumbuh, ia memiliki ekspresi etnis yang berbeda. Saat ini, banyak nasionalis Papua membuat perbedaan yang kuat antara orang Papua dan orang lain, terutama orang Indonesia, melakukan hal itu dalam istilah budaya dan etnis yang mencerminkan hubungan yang kompleks dan beragam yang mereka miliki.

Sumber: Margaretha Hanita, 2019

Setidaknya ada lima akar yang menumbuhkan perasaan etnonasionalisme Papua sebagaimana bisa dibaca dari Tabel di bawah. Ini tidak menutup kemungkinan terdapatnya akar-akar lain yang ikut menumbuhkan perasaan etnonasionalisme Papua. Lima akar yang membentuk tumbuhnya perasaan etnonasionalisme ini setidaknya juga berkaitan dengan teori-teori dan konsep-konsep nasionalisme-biologisme, nasionalisme etnis dan etnonasionalisme yang dikemukakan oleh para ilmuwan sosial di atas. Berikut ini dibahas satu per satu akar-akar primordialisme Papua tersebut.

Tabel 2. Akar Etnonasionalisme Papua

Akar	Penjelasan
Ras Melanesia	Hubungan kekerabatan, budaya dan sosial penduduk Papua bagian Barat dengan Papua bagian Timur (PNG) sudah terjadi sejak zaman sebelum orang Eropa menduduki pulau Papua. Demikian pula dengan pulau-pulau di Pasifik Selatan yang kemudian menjadi negara-negara kecil setelah dekolonisasi. Ras mereka sama, adat-istiadat, kebiasaan, cara hidup, identitas kultural dan sosial mereka sama. Kesamaan identitas, termasuk identitas fisik yang serupa membentuk perasaan sebagai ras yang sama. Pemerintah Hindia Belanda mendekatkan orang Papua ke dalam ras Melanesia daripada mendekatkan orang Papua ke ras Melayu yang merupakan mayoritas penduduk Hindia Belanda, misalnya dengan memasukkan Papua Barat ke dalam Komisi Pasifik Selatan.
Agama-agama lokal	Para tokoh agama-agama lokal seperti Korero dan Hai (dua agama setempat yang besar) merupakan tokoh yang mengikat para pengikutnya dalam ikatan primordial keagamaan yang sifatnya eksklusif.
Ikatan Adat	Struktur kehidupan sosial orang Papua adalah struktur adat yang sangat mempengaruhi hidup orang Papua. Suku, klan, keret adalah pranata yang mengatur hidup orang Papua. Korano, kepala suku, manawir mnu adalah orang-orang yang berperan membentuk kepatuhan dan ikatan kuat orang Papua pada kelompoknya, suku, klan dan pada akhirnya kesetiaan pada etnis dan bangsanya.
Pembentukan elite pemerintahan dan politik	Pemerintah Hindia-Belanda merekrut anak-anak Korano (pemimpin suku yang karismatis dan dihormati) menjadi siswa di sekolah-sekolah pamong praja seperti OSIBA : Opleiding School voor Inheemse Berstuurs Ambtenaren di Abepura. Rekrutmen elite pemerintahan dan politik yang dipersiapkan untuk dekolonisasi ini memperkuat perasaan etnonasionalisme di kemudian hari.
Perasaan terampas / tercerabut dari tanahnya sendiri/ eksploitasi ekonomi	Kekuasaan Indonesia yang datang dan membatalkan proklamasi kemerdekaan Papua Barat (1 Desember 1961) dan penguasaan/eksploitasi sumber-sumber alam milik adat menimbulkan perasaan terampas/tercerabut (yang dalam teori James Kellas disebut Perampasan Relatif) yang memunculkan perasaan etnonasionalisme yang meluas.

Sumber: Margaretha Hanita, 2019

Akar Ras Melanesia

Ras Melanesia (pulau-pulau hitam) yang merujuk pada wilayah geografis dikemukakan oleh penjelajah Prancis Jules-Sébastien-César

Dumon (1790-1842) yang memimpin pelayaran ke Pasifik Selatan.²¹ Melanesia digunakan Dumon untuk menunjuk wilayah geografis dari Pulau Aru, Pulau Papua hingga pulau-pulau di Vanuatu, Solomon, Kaledonia Brau, Fiji dan pulau-pulau kecil Pasifik Selatan Selatan lainnya. Dumon menyebutnya sebagai pulau-pulau hitam karena penduduknya berkulit hitam. Berdasarkan pembagian wilayah ras ini maka orang-orang Papua merasa bahwa mereka adalah ras Melanesia, serumpun dengan penduduk negara-negara di Pasifik Selatan. Pemerintah Hindia Belanda juga memasukkan Papua Barat ke dalam Komisi Pasifik Selatan (*South Pacific Commission*).

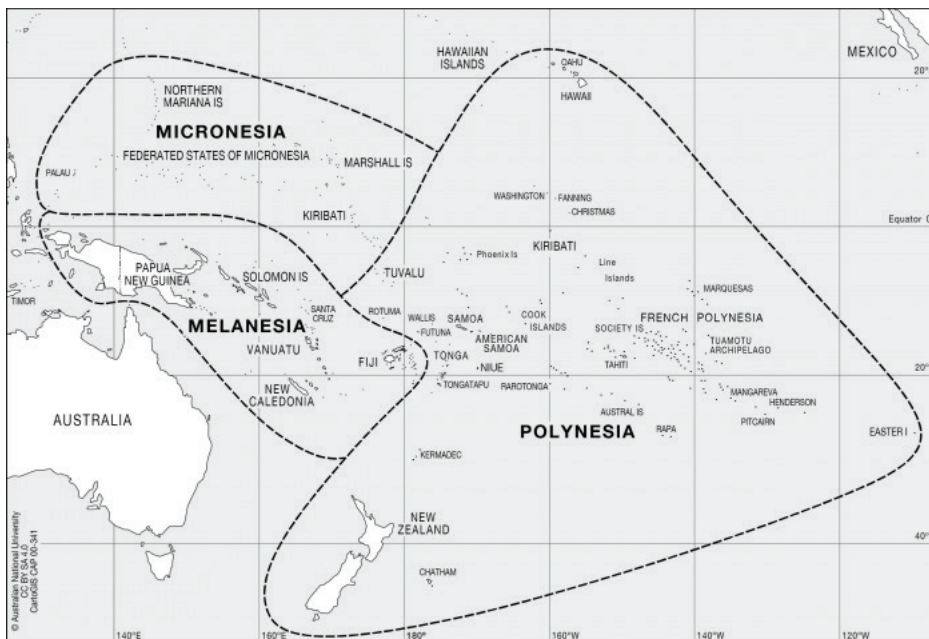
Komisi Pasifik Selatan adalah pakta ekonomi, kultural, dan sosial di antara bangsa-bangsa yang belum menentukan nasibnya sendiri (*non-self-governing territories*) di Pasifik Selatan. Komisi ini didirikan oleh pemerintah Australia, Prancis, Belanda, New Zealand, Inggris, dan Amerika Serikat. Negara-negara ini waktu itu memiliki koloni (wilayah jajahan) yang belum berdaulat di wilayah Pasifik Selatan. Perjanjian pembentukan Komisi ditandatangani 6 Februari 1947 di Canberra, namun berlaku efektif pada 29 Juli 1948.²² Mula-mula wilayah Komisi meliputi pulau-pulau di Selatan garis Khatulistiwa termasuk Nugini-Australia dan paling Barat Lautan Prancis dan Pulau Pitcairn.

Pada 1951 bertambah luas dengan masuknya Guam dan Trust Territory di Kepulauan Pasifik di bawah kekuasaan Amerika Serikat seperti Pulau Marianes, Caroline dan Pulau Marshall. Markas Besar Komisi di Noumea, Kaledonia Baru. Diaspora etnonasionalis Papua juga berada di negara-negara Pasifik Selatan seperti di Vanuatu, Solomon dan Fiji. Solidaritas negara-negara Melanesia juga ditunjukkan di forum-forum PBB dan tindakan perlindungan politik pada diaspora etnonasionalis yang bermukim di negara-negara Melanesia itu.

²¹ Stephanie Lawson: 'Melanesia'. *The Journal of Pacific History*, (2013)

²² New Guinea Institute of Rotterdam, *Handbook of Netherlands New Guinea*, (Rotterdam, New Guinea Institute of Rotterdam, 1958), 24-25.

Gambar 1. Peta Wilayah Ras Melanesia, Micronesia dan Polynesia



Sumber: Australian National University, Canberra.

Ikatan sebagai ras Melanesia yang berkulit hitam dan berwajah khas ini semakin menguat dengan berbagai diskriminasi dan penghinaan yang dilakukan ras mayoritas di Indonesia. Hinaan-hinaan yang dilakukan oleh orang-orang di kota-kota mahasiswa di Jawa seperti di Surabaya, Malang dan Jogjakarta dan perlakuan diskriminasi polisi setempat terhadap para mahasiswa Papua yang bersekolah di kota-kota itu (Agustus 2019) menimbulkan gelombang protes dan tuntutan kemerdekaan di kota-kota di Provinsi Papua dan Papua Barat (September-Oktober 2019).

Undang-Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua adalah akomodasi perasaan etnonasionalisme Papua. Akomodasi itu pertama dengan dibentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP) dan ketentuan Gubernur Papua adalah orang asli Papua. Undang-undang ini membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) perwakilan kultural masyarakat Papua yang memiliki kewenangan legislatif maupun kewenangan *self regulatory* (menerbitkan peraturan yang mengikat). MRP merupakan semacam parlemen karena memiliki tugas-tugas dan wewenang-wewenang yang dimiliki parlemen, dipilih secara langsung oleh rakyat, namun juga merupakan lembaga perwakilan kultural yang salah satu tugas utamanya adalah menjaga dan memperjuangkan hak-hak orang asli Papua (yang sering disingkat OAP). Jadi MRP

tidak memiliki tugas memperjuangkan hak-hak orang Papua non-asli (amberi istilah politik orang Papua untuk menyebut pendatang dari luar). Adapun kelompok non-asli Papua yang berdomisili di wilayah Papua akan diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang para anggotanya dari partai-partai politik dipilih langsung oleh rakyat dalam Pemilihan Umum. Pada saat yang sama, warga asli Papua juga memilih anggota DPRP yang akan mewakilinya.

Adapun tentang terminologi “orang asli Papua”, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua secara eksplisit mengakui tentang identitas orang Papua yang dinyatakan sebagai berikut: “Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua”. Pengakuan tentang identitas semacam ini merupakan hubungan yang baru sama sekali antara pusat dan daerah dalam sejarah Indonesia, terutama di bawah pemerintahan Soekarno maupun Soeharto. Terminologi “Melanesia” untuk mengidentifikasi orang-orang asli Papua merupakan hasil dari demokratisasi Indonesia. Dalam demokrasi, perbedaan kultural dan ras, termasuk pengakuan bahwa ras sebuah minoritas bangsa dalam sebuah negara bangsa bisa secara terbuka diakui sebagai perbedaan yang harus disadari. Pandangan seperti ini tampaknya yang ada di dalam pikiran para pembuat undang-undang ini. Namun dengan sudut pandang sebaliknya, akomodasi etnonasionalisme ini dimaksudkan untuk mereduksi gerakan etnonasionalisme itu sendiri. Ini juga semacam akomodasi etnonasionalisme terbatas, di mana para pembuat undang-undang membuka peluang orang bukan asli Papua menjadi gubernur yakni pada kalimat “... dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Ini artinya orang bukan asli Papua bisa menjadi gubernur asal diakui sebagai orang asli Papua.

Keputusan MRP No 14/MRP/2009 tentang Penetapan Orang Asli Papua sebagai Syarat Khusus dalam Penentuan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Tanah Papua menghapus peluang orang bukan asli Papua, orang yang tidak memiliki darah Papua untuk menjadi bupati dan walikota di Papua. Menurut Keputusan MRP tersebut yang dimaksud orang asli Papua adalah (a) Orang yang lahir dari ayah dan ibu asli Papua rumpun ras Melanesia; (b) Orang asli Papua yang mengikuti garis keturunan ayah (sistem patrilineal); (c) Orang asli Papua yang mempunyai basis kultur dalam adat masyarakat asli Papua. Selanjutnya, Keputusan MRP memberi wewenang kepada MRP sendiri untuk memberi pertimbangan dan persetujuan atas identitas keaslian orang Papua yang mencalonkan diri

sebagai walikota atau bupati yang diajukan oleh DPRD Kabupaten/Kota kepada MRP. Keputusan MRP ini ditolak Komisi Pemilihan Umum Daerah Papua.

Akar Primordial Agama-agama Lokal

Apakah etnonasionalisme berkembang di Papua? Dalam penelitian saya tentang pengaruh agama-agama asli Papua dalam gerakan politik orang-orang Papua, selama bertahun-tahun saya menemukan tumbuhnya etnonasionalisme di Papua.²³ Koreri, Hai dan agama-agama setempat di Papua adalah salah satu yang terbesar sumber etnonasionalisme Papua, selain kesadaran identitas sebagai rumpun bangsa-bangsa Melanesia yang mendiami pulau-pulau di Samudra Pasifik Selatan yang secara etnis, budaya dan penampakan fisik serupa. Agama-agama asli ini eksklusif, Koreri hanya untuk orang Biak dan Hai hanya untuk orang Amungme. Orang Me juga memiliki agama sendiri yang juga mesianistik dan menentang penguasa dari luar.²⁴

Kata Koreri diinterpretasikan oleh J.V. de Bruyn sebagai Negara Ideal atau Negara Utopia,²⁵ dari akar kata *rer* yang berarti pergantian kulit, seperti yang terjadi pada ular yang berganti kulit pada periode tertentu secara rutin dalam hidupnya. Negara Utopia yang dicita-citakan Koreri adalah negara di mana segala penderitaan, kematian, kemiskinan, peperangan, yang terdapat di dunia dikalahkan oleh Koreri, yakni saat di mana manusia akan hidup dengan penuh damai dan kebahagiaan abadi, sebagaimana yang diharapkan kehidupan di surga. J. Gz Pijnakker²⁶ menulis tentang figur Manarmakeri dalam bukunya yang terbit pada Januari 1884. Pijnakker menulis bahwa Manarmakeri mengharapkan akan datang kembali suatu hari dan mendirikan kerajaan di dunia yang sejahtera. Zaman keemasan orang Papua akan tiba, di mana tidak ada seorangpun yang harus bekerja, namun makanan berlimpah. Kedatangan Manarmakeri menurut Pijnakker akan menandai dimulainya zaman Koreri, di mana penyakit akan disembuhkan, kematian akan dihapuskan dan kehidupan akan abadi tanpa kematian. Enos Rumansara, antropolog Universitas Cendrawasih, seorang tokoh Koreri mengakui iman tentang datangnya Koreri menjadi dasar ideologi gerakan sosial dan politik di

²³ Margaretha Hanita, *Cita-cita Koreri, Gerakan Politik Orang Papua*, (Jakarta : Universitas Indonesia Publishing, 2019)

²⁴ Benny Giay "Zakheus Pakage and His Communities: Indigenous Religious Discourse, Socio-political Resistance, and Ethnohistory of the Me of Irian Jaya," Disertasi doktor, Department of Cultural Anthropology/Sociology of Development, Free University, Amsterdam. 1995.

²⁵ Bruyn, J.V. de. *De Manaren-cultus der Biakkers (Kultus Manaren di antara Orang-Orang Biak)*, TBG, DI, LXXXIII, (1949), 9-15.

²⁶ Pijnakker Gz, J. *Eenige bijzonderheden betreffende De Papoea's van de Geelvinksbai van Nieuw Guinea*, BKL, DI 2, (1854), 371-383.

Papua hingga saat ini.²⁷

Hai adalah agama orang Amungme yang mendiami wilayah di lembah-lembah Gunung Grazeberg, gunung tembaga dan emas yang ditambang Freeport McMoran. Hai mendambakan kedatangan Zaman Bahagia yang dipercaya akan datang atas Suku Amungme. Penderitaan Suku Amungme mencapai puncaknya ketika Freeport merampas gunung suci yang digambarkan sebagai Ibu orang Amungme, di mana penganiayaan, pembunuhan dan penyingkiran mereka alami terus menerus. Menurut Tom Beanal, tokoh Amungme yang percaya akan kedatangan Zaman Bahagia, Hai akan datang entah kapan dan akan menyejahterakan orang-orang Amungme dan membebaskan dari penderitaan panjang karena kehadiran orang-orang asing di tanah mereka.²⁸

Wacana etnonasionalisme tidak hanya muncul dan tumbuh di kalangan agama Koreri dan Hai, namun juga di sistem kepercayaan tradisional lainnya yang digambarkan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Wacana Etnonasionalisme Agama-Agama Asli Papua

Agama Lokal	Wacana Etnonasiobalisme
Koreri	Manarmakeri akan datang membawa Koreri dan Kanda-mowoser, orang Biak akan hidup bahagia dalam negara merdeka tanpa penderitaan.
Hai	Zaman Bahagia (Hai) akan datang kembali membawa kebahagiaan bagi orang-orang Amungme di mana akan ada kesejahteraan dan kehidupan abadi.
Kasiep (Roh Orang Mati)	Orang-orang Nimboran percaya bahwa segala sesuatu dalam hidup mereka diatur oleh Kasiep dan kepatuhan dan kesetiaan terhadap Kasiep akan membebaskan mereka.
Wege-Bage	Kesejahteraan orang Me akan datang setelah melewati segala penderitaan. Maka Zakheus Pakage memprakarsai gerakan yang disebut Wege Bage (1952-1954) Paniai sebagai bentuk kegelisahan atas penetrasi dari luar. ¹
Simson	Kesejahteraan untuk pengikut Simson di Jayapura akan datang dengan perjuangan. Maka pendeta Simson (1946-1947) menyatukan orang Jayapura dan sekitarnya melawan Belanda tetapi akhirnya dihancurkan pada 1947.

Sumber: Margaretha Hanita (2019)

²⁷ Wawancara, 2019.

²⁸ Wawancara Tom Beanal 2010.

Akar Ikatan Adat

Struktur kehidupan sosial orang Papua adalah struktur adat yang sangat memengaruhi hidup orang Papua. Suku, klan, keret (di Biak) adalah pranata yang mengatur hidup orang Papua. Korano, kepala suku, manawir mnu (kepala klan di Biak) adalah orang-orang yang berperan membentuk kepatuhan dan ikatan kuat orang Papua pada kelompoknya, suku, klan dan pada akhirnya kesetiaan pada etnis dan bangsanya. Kehidupan sosial, hukum dan politik didominasi oleh para kepala adat yang tugas utamanya adalah mengurus hal-ikwal administrasi adat seperti memberi atau menolak izin penggunaan tanah dan pembangunan rumah anggota klan di wilayah kekuasaannya; memegang kekuasaan kehakiman di wilayah klan itu, misalnya menyelesaikan sengketa di antara para anggota klan. Tugas utama lainnya adalah mewakili klannya berhubungan dengan klan lain, misalnya dalam penyelesaian sengketa antar klan.²⁹ Intinya, siklus kehidupan sosial-budaya orang Papua tidak bisa menjalankan tanpa campur tangan adat dan kepala-kepala adat. Studi terakhir tentang Papua oleh Prof Purwo Santoso dan kawan-kawan dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta menggambarkan peranan yang kuat dari kepala-kepala adat seperti yang terjadi di Nduga beberapa waktu lalu. Dalam bukunya *In Search of Local Regime in Indonesia: Enhancing Democratisation In Indonesia*,³⁰ Prof Purwo Santoso dan kawan-kawan melihat peran yang kuat dari golongan adat di Papua. Ikatan-ikatan yang kuat pada masyarakat adat ini menjadi salah satu akar yang membentuk etnonasionalisme Papua.

Pembentukan elit pemerintahan dan politik

Pemerintah Hindia-Belanda memulai tradisi rekrutmen anak-anak Korano (pemimpin suku yang karismatis dan dihormati) menjadi siswa di sekolah-sekolah pamong praja seperti OSIBA (*Opleiding School voor Inheemse Berstuurs Ambtenaren*) di Abepura. Rekrutmen elite pemerintahan dan politik yang dipersiapkan untuk dekolonisasi Papua Barat menjadi negara berpemerintahan sendiri.³¹ Para anak Korano ini, yang kebanyakan anak laki-laki kepala suku yang cerdas, didik dalam sistem Pendidikan Barat dipersiapkan untuk menjadi birokrat. Kebanyakan para lulusan OSIBA menjadi ambtenar penting di birokrasi

²⁹ J.R. Mansoben. "Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya, Indonesia: Studi Perbandingan," Disertasi di Universitas Leiden, (1994), 243.

³⁰ Purwo Santoso et. al. *In Search of Local Regime In Indonesia: Enhancing Democratisation In Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan PolGov Fisipol UGM dan Universitas Oslo, 2018.

³¹ Pim Schoorl. *Belanda di Irian Jaya, Amtenar di Masa Penuh Gejolak, 1945-1962*. (Jakarta : Perwakilan KITLV, 2001)

pemerintahan Belanda di Papua Barat antara 1945-1962. Setelah Papua Barat diambil Indonesia, para ambtenar anak-anak kepala suku ini direkrut Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan penting di Provinsi Irian Jaya. Para Gubernur Irian Jaya masa itu kebanyakan adalah para lulusan OSIBA. Para birokrat lulusan OSIBA yang terdeteksi sebagai etnonasionalis diberhentikan dan diganti dengan birokrat yang setia pada nasionalisme Indonesia. Pendidikan pamong praja untuk para anak kepala dirintis oleh residen Jan van Eechoud. Eechoud memiliki misi khusus untuk menanamkan Nasionalisme Papua dan membuat orang Papua setia kepada Pemerintah Belanda. Untuk itu setiap orang yang terbukti pro-Indonesia dapat ditangkap atau dipenjarakan dan dipindahkan dari Irian Jaya sebagai tindakan untuk menjalankan aktivitas pro-Indonesia di Irian Jaya. Beberapa orang yang mengikuti pendidikan Eechoud dan kemudian menjadi terkemuka dalam aktivitas politik antara lain: Markus Kaiseipo, Frans Kaiseipo, Nicolaas Jouwe, Herman Wajoi, Silas Papare, Albert Karubuy, Musa Rumainum, Baldus Mofu, Eliezer Jan Bonay, Lukas Rumkorem, Martin Indey, Johan Ariks, Herman Womsiwor, dan Abdulah Arfan.³² OSIBA ditutup oleh pemerintah Indonesia dan dilebur menjadi Universitas Cendrawasih. Namun para lulusan OSIBA ini terus menjadi agen penumbuh perasaan etnonasionalisme Papua di kemudian hari.

Di Papua, zaman kini, pemimpin politik tidak akan memiliki legitimasi yang kuat jika tidak memperoleh dukungan masyarakat adat. Di zaman politik modern sekarang ini rekrutmen elit politik Papua bisa berasal dari tiga sumber yakni: (1) dari elite masyarakat adat (2) elite Gereja dan (3) elite masyarakat sipil (civil society). Legitimasi paling kuat adalah jika elite tersebut berasal dan didukung oleh masyarakat adat, namun ia akan memiliki kuasa yang besar jika didukung oleh ketiganya yakni didukung oleh masyarakat adat, Gereja dan civil society.

Perasaan terampas/tercerabut dari tanahnya sendiri/eksploitasi ekonomi

Kekuasaan Indonesia yang datang dan membatalkan proklamasi kemerdekaan Papua Barat (1 Desember 1961) dan penguasaan/eksploitasi sumber-sumber alam milik adat menimbulkan perasaan terampas/tercerabut (yang dalam teori James Kellas disebut Perampasan Relatif) yang memunculkan perasaan etnonasionalisme

³² Leontine E Visser dan Amapon Jos Marey . *Bakti Pamong Praja Papua, di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Kompas, 2008)

yang meluas. Orang-orang Papua juga merasakan penyelenggaraan Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969 tidak adil dan dimaksudkan untuk kemenangan Indonesia. Penentuan Pendapat Rakyat atau referendum untuk rakyat Papua dilakukan tidak dengan metode one man one vote namun melalui metode perwakilan yang meniru pemilihan anggota Dewan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Dengan metode pemilihan seperti ini dan intimidasi referendum dimenangi Indonesia.³³ Keterampasan lainnya adalah keterampilan sumber daya alam yang bermakna ekonomi seperti penambangan emas dan tembaga oleh Freeport selama puluhan tahun dan pembabatan hutan-hutan alam Papua.³⁴ Kehadiran amberi, pendatang dan mendominasi birokrasi pemerintahan, perdagangan, bisnis dan sktor-sektor informal lainnya menggeser kesejahteraan orang-orang Papua.

Persamaan dan Perbedaan Etnonasionalisme Papua, Kurdi dan Tamil

Untuk memperkuat keyakinan bahwa etnonasionalisme tumbuh di Papua, setidaknya dibutuhkan perbandingan dengan gerakan-gerakan etnonasionalisme di tempat-tempat lain. Perbandingan dengan Etnonasionalisme Kurdi dan Tamil dalam Tabel di bawah ini setidaknya membantu keyakinan kita bahwa etnonasionalisme Papua merupakan fakta yang terdapat di Papua. Akar-akar etnonasionalisme ketiganya juga sejalan teroi-teori tentang etnonasionalisme yang dikemukakan James Kellas, Barbara Harff, Ted Robert Gurr dan Walker Connor.

³³ Moses Kilangin. *Uru Me Ki*. (Jayapura: Penerbit Tabura, 2009)

³⁴ Benny Giay. "Hai: Motif Pengharapan Zaman Bahagia di Balik Protes Orang Amungme di Timika, Irian Jaya dan Isu HAM". *Deiyai*, Majalah Informasi Agama dan Kebudayaan Irian Jaya, Edisi Perdana September-Oktober. (1995).

Tabel 4. Persamaan dan Perbedaan Etnonasionalisme Papua, Kurdi dan Tamil

	Papua	Kurdi	Tamil
Akar Primordialisme	Sedarah dalam ras Melanesia, persamaan identitas kultural, kohesi sosial, ikatan pada agama-agama lokal, identitas fisik, sejarah politik.	Perasaan sebagai orang Kurdi yang bukan bangsa Turki, bukan bangsa Arab dan bukan bangsa Persia; ikatan pada kemurnian etnis Kurdi; ikatan pada bahasa, agama dan budaya.	Tamil adalah minoritas etnis di Sri Lanka yang dihuni mayoritas etns Sinhala (Budha). Tamil berbeda Bahasa dan agama (Hindu).
Orientasi Politik	Keinginan menjadi bangsa yang merdeka sebagaimana sudah diproklamasikan pada 10 Desember 1964 di Niuew Guinea Raad (Dewan Perwakilan Papua Barat); Berhimpun dengan negara-negara rumpun Melanesia di Pasifik Selatan.	Keinginan menjadi bangsa Kurdi bersatu (Kurdi-Turki, Kurdi Irak, Kurdi Iran, Kurdi Suriah dan Kurdi Diaspora) yang memiliki negara merdeka.	Tamil terampas secara kultural, ekonomi dan politik di Sri Lanka. Setelah kemerdekaan, pemerintah menerbitkan "Only Sinhala Act 1956" yang melarang Bahasa Tamil digunakan dalam pemerintahan. Pada 1992 kuil-kuil Hindu diserang yang berakibat memperkuat etnonasionalisme Tamil.
Tipe Gerakan	Gerakan kultural, sosial, politik dan gerakan bersenjata.	Gerakan politik dan gerakan bersenjata.	Gerakan politik dan bersenjata.
Wilayah tinggal	Indonesia: Pulau Papua bagian Barat dan gugusan kepulauan di Teluk Cendrawasih dan Raja Ampat.	Turki, Irak, Suriah, Iran.	Sri Lanka

Sumber: Margaretha Hanita, 2019 berdasarkan Margarteha Hanita (2019). Cta-cita Kreri, Gerakan Politik orang Papua. UNI Pubhling, Jakarta; Bibhuti Mary Kachhap and Aju Aravind (2018). "Revisiting Ethno-nationalism: A Study of Nihal De Silva's The Road from the Elephant Pass." Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies

in Humanities". Vol. 10, No. 1; Zeki Sarigil and Omer Fazlioglu (2014). "Exploring the roots and dynamics of Kurdish ethno-nationalism in Turkey". *Nations and Nationalism* 20 (3), pp. 436-458.

Pembahasan

Teori Deprivasi Relatif James G. Kellas bisa menjelaskan bagaimana etnonasionalisme Papua lahir dan berkembang. Teori Deprivasi Relatif Kellas menggambarkan dengan tepat dan akurat bagaimana etnonasionalisme Papua lahir dan berkembang pesat. Ini terjadi sesuai dengan Teori Deprivasi Budaya yang dijelaskan di atas bahwa nasionalisme atau etnonasionalisme cenderung muncul karena pengalaman-pengalaman buruk kelompok etnis dalam hubungannya dengan etnis lain yang mendominasi. Pengalaman-pengalaman buruk itu dirasakan terus-menerus dan berulang oleh orang-orang Papua yang mencapai puncaknya dalam peristiwa Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya Agustus 2019; peristiwa rasial dan perendahan martabat yang sudah tidak bisa diterima lagi oleh masyarakat Papua.

Menggunakan pendekatan primordialis-sosiobiologis ini untuk melihat etnonasionalisme Papua memungkinkan kita untuk memahami etnonasionalisme Papua yang dua-duanya terus bergerak mengikuti perkembangan sosio-politik nasional, regional maupun global. Etnonasionalisme Papua tumbuh karena kesadaran primordialisme yang disebut Geertz sebagai karunia, tidak dapat disangkal, tidak dapat dijelaskan atau dianalisis dengan merujuk pada interaksi sosial, tetapi bersifat memaksa dan berurusan dengan sentimen. Penelitian saya selama bertahun-tahun pada komunitas Korori dan Hai menegaskan bahwa primordialisme ada berdasarkan ikatan-ikatan budaya dasar mereka sebagai orang Papua. Jadi etnonasionalisme Papua terjadi berdasar ikatan-ikatan primordialis-sosiobiologis sebagaimana dikemukakan Llobera.

Ini berbeda dengan (etno)nasionalisme Hindu di India yang sektarian, etnonasionalisme Papua jauh dari sektarianisme yang membenci kelompok lainnya. Etnonasionalisme Hindu menjadikan Muslim India sebagai musuh utama.³⁵ Kalim Siddiqui menggambarkan gerakan ini sebagai organisasi-organisasi Hindu sayap kanan di India, terutama sejak 1990an yang anti minoritas yang meningkat secara dramatis, yang membutuhkan musuh dalam bentuk agama minoritas untuk menyatukan umat Hindu dan mengkonsolidasikan

³⁵ Jack Snyder. *From Voting to Violence Democratization and Nationalist Conflict*. (London : W. W. Norton & Company, 2000), 333.

dukungan mereka.³⁶ Organisasi-organisasi yang menonjol adalah RSS (Rastriya Sevak Sangh), BJP (*Bharatiya Janata Party*), VHP (*Vishva Hindu Parishad*), Bajang Dal dan Shiv Sena. Organisasi-organisasi ini bergerak bersama di bawah filosofi Hindutva, anti-minoritas dan fanatik dalam pendirian.³⁷ Arun R. Swamy³⁸ menjelaskan bahwa Etnonasionalisme Hindu harus dibedakan dengan Nasionalisme Kongres Nasional India, atau nasionalisme yang dikembangkan oleh Partai Kongres, yang sering disebut sebagai Nasionalisme India. Nasionalisme India pada dasarnya adalah nasionalisme yang mendasarkan diri pada wilayah dan kewarganegaraan, yang mengidentifikasi sebagai orang India tanpa kecuali. Berbeda dengan Nasionalisme Hindu yang berusaha untuk mengidentifikasi bangsa India sesuai dengan kriteria etnis dan agama.³⁹

Bagaimana meletakkan etnonasionalisme Papua dalam Nasionalisme Indonesia? Ini pertanyaan yang penting dan signifikan untuk didiskusikan dalam konteks politik integrasi Indonesia atas Papua. Untuk membahas masalah ini kita harus membaca pemikiran Will Kymlica yang menjelaskan bahwa satu sumber keragaman budaya adalah kehadiran bersama lebih dari satu bangsa di dalam suatu negara tertentu, di mana bangsa berarti komunitas historis, kurang lebih lengkap secara institusional, menduduki suatu wilayah atau tanah tertentu, memiliki bahasa dan kebudayaan sendiri. Maka, menurut Kymlica suatu negara yang penduduknya lebih dari satu bangsa bukanlah negara bangsa, melainkan negara multi bangsa dan kebudayaan terkecil membentuk minoritas bangsa.⁴⁰

Merujuk Kymlica, dengan demikian Indonesia adalah negara multi bangsa, bukan negara bangsa (*nation state*) sebagaimana dikenal selama ini. Kymlica menegaskan: Masuknya berbagai bangsa dalam suatu negara dapat terjadi secara tidak sengaja karena muncul ketika masyarakat satu kebudayaan diserang atau ditaklukkan oleh masyarakat lainnya, atau diserahkan dari satu kekuatan imperial lain ke kekuatan imperial lainnya atau ketika tanah mereka diduduki pendatang yang menjajah. Namun pembentukan negara multi bangsa dapat juga terjadi secara sengaja, ketika berbagai kebudayaan sepakat untuk membentuk suatu federasi untuk kepentingan bersama.⁴¹

³⁶ Kalim Siddiqui. "A Critical Study of 'Hindu Nationalism' in India". *Journal of Business & Economic Policy*, Vol. 3, No. 2; June 2016, (2016), 9.

³⁷ *Ibid.*, 9.

³⁸ Arun R. Swamy. "Hindu Nationalism, What's Religion Got to do with it?" *Occasional Paper Series, Asia-Pacific Center for Security Studies*. (2003).

³⁹ Christophe Jaffrelot. *The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics, 1925 to the 1990s*. (New Delhi: Penguin Books India, 1996).

⁴⁰ Will Kymlicka, *Kewargaan Multikultural, Teori Liberal mengenai Hak-Hak Minoritas* (Jakarta: LP3ES, 2003), 14.

⁴¹ *Ibid.*, 14-15.

Konsep-konsep Kerentanan dan Ketahanan bisa digunakan untuk menunjukkan seberapa rentan dan seberapa tahan baik dalam masyarakat Papua maupun dalam negara Indonesia sendiri, yakni: seberapa rentan dan tahan masyarakat Papua hidup sebagai kelompok etnis yang merasa terdiskriminasi dari segi ras, ekonomi, politik dan budaya sebaliknya seberapa rentan dan tahan Indonesia (pemerintah dan masyarakat Indonesia pada umumnya) mempertahankan keamanan dan ketertiban di Papua. Sejauh ini menurut penelitian longitudinal saya di Papua, masyarakat etnis Papua di Papua memiliki ketahanan yang kuat, mampu beradaptasi dalam situasi apapun dan mampu bangkit kembali (*bounce back*) setelah mengalami berbagai krisis. Adaptasi dan bangkit kembali adalah dua terminologi studi ketahanan yang digunakan untuk menggambarkan seberapa tahan sebuah komunitas (etnis atau bangsa) menghadapi guncangan demi guncangan. Di pihak lain, pemerintah Indonesia terus berupaya dengan berbagai upaya memperkuat ketahanan nasionalnya di Papua misalnya dengan pemberian otonomi khusus dan mengakomodasi perasaan etnonasionalisme orang Papua secara terbatas.

Implementasi otonomi khusus antara lain adalah program Papuanisasi Birokrasi di Papua yang mirip dengan Papuanisasi birokrasi di zaman Belanda yang bertujuan untuk dekolonisasi. Pemerintahan demokratis di Indonesia setelah 1998 berpandangan bahwa etnis Papua harus diberi otonomi untuk mendekatkan kembali keanggotaan etnis Papua ke dalam negara multi bangsa Indonesia. Hal yang sama dilakukan terhadap Aceh yang selama puluhan tahun menolak menjadi anggota negara bangsa Indonesia. Jadi untuk dua provinsi ini diterbitkan dua undang-undang khusus dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik, sosial, hukum dan budaya. Ini merupakan upaya maksimal yang bisa dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menjaga ketahanan nasionalnya.

Tetapi gelombang aksi demonstrasi di Papua dewasa ini seperti mengingatkan kembali bahwa strategi ketahanan nasional yang digunakan tidak teralu efektif untuk mengatasi masalah Papua, sebaliknya strategi serupa (pemberian otonomi) khusus efektif berlaku untuk Aceh. Apa yang salah di Papua? Kerapuhan utama otonomi khusus Papua adalah walaupun otonomi Papua adalah tidak melibatkan semua kelompok yang bersengketa di Papua. Di Aceh semua kelompok diajak berbicara dan menghasilkan Perjanjian Helsinki (2005). Di Aceh juga diperkenankan partai-partai lokal berdiri dan ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Integrasi politik di Aceh menghasilkan kemajuan yang signifikan. Aceh juga secara ras dan kultural tidak jauh berbeda dengan mayoritas-mayoritas etnis di

Indonesia, termasuk agama mayoritas yang dianut. Ikatan primordial orang Aceh hanya tunggal: suku Aceh. Berbeda dengan Papua yang secara ras berada jauh dari ras mayoritas orang Indonesia dan betapa banyaknya ikatan-ikatan primordialisme mereka. Orang Papua merasa sebagai bagian dari ras Melanesia. Dengan perbedaan ini, maka Papua lebih rentan daripada Aceh, sehingga yang dibutuhkan Pemerintah Indonesia adalah mengadaptasi tantangan-tantangan ini melalui strategi ketahanan nasional baru yang jauh lebih progresif dan jauh lebih demokratis.

Gerakan Etnonasionalisme Papua secara historis beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Gerakan-gerakan etnonasionalis berbasis agama dan adat setempat di zaman awal kedatangan orang Belanda, bertransformasi menjadi gerakan Nasionalisme Papua yang dibentuk pemerintah Hindia Belanda dalam rangka proses dekolonisasi dan birokratisasi negara Papua Barat yang akan dikelola oleh orang Papua. Nasionalisme Papua ditumbuhkan Hindia Belanda, untuk menghadapi Indonesia yang sangat berambisi untuk menguasai Papua Barat. Pembentukan Nasionalisme Papua, dengan Pendidikan pamong praja untuk pribumi yang massif, pembentukan kelompok-kelompok studi kaum terpelajar dan pembentukan partai-partai politik Papua berhasil membentuk Nasionalisme Papua yang kuat. Setelah kehadiran Indonesia sebagai penguasa baru, Nasionalisme Papua bentukan Belanda diredam dengan segala cara, namun pada saat yang bersamaan, Nasionalisme Papua beradaptasi dan bertransformasi menjadi Etnonasionalisme Papua.

Penutup

Masalah hubungan antara Pemerintah Indonesia dengan Papua bukanlah monopoli Indonesia, sejumlah negara juga memiliki masalah hubungan yang sama, misalnya Kanada dengan etnonasionalis Quebec, Tiongkok dengan etnonasionalis Tibet dan Uighur, Filipina dengan etnonasionalis Mindanao, Thailand dengan etnonasionalis Thailand Selatan, Sri Lanka (Sinhala) dengan etnonasionalis Tamil dan masih banyak lagi. Masing-masing negara memiliki cara berbeda-beda dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasionalnya masing-masing. Ada negara-negara yang bertindak anti demokrasi dan ada negara yang bertindak dengan metode demokratis untuk merespon masalah-masalah dalam negerinya.

India berhasil penyelesaian hubungannya dengan Goa (bekas jajahan Portugis) yang diambilalih dari Portugis pada 1961. India adalah bekas Jajahan Inggris, mayoritas beraga Hindu dan Goa adalah jajahan Portugis yang mayoritas Katolik. Sebelum diambilalih India,

kaum etnonasionalis Goa melakukan gerakan kemerdekaan dari Portugis namun sebelum proses dekolonisasi selesai, India sudah menduduki Goa. Hubungan yang tegang antara India dan kaum etnonasionalis Goa diselesaikan dengan pemberian otonomi khusus di mana orang Goa diberi kebebasan untuk memerintah wilayahnya sendiri namun tetap di bawah hukum nasional India. Quebec di Kanada adalah wilayah berbahasa Prancis di mana penduduknya terbelah jadi dua: ingin menjadi negara sendiri atau tetap berada di bawah Kanada. Referendum terakhir dilakukan pada 1995 yang dimenangkan oleh pemilih yang pro Kanada. Penyelesaian demokratis ini diterima kedua belah pihak, walaupun gerakan kedaulatan Quebec terus-menerus menuntut referendum ulang dan dijadwalkan dilakukan pada 2022. Tiongkok menerapkan ketahanan nasional represif (tidak demokratis) terhadap Tibet dan Uighur untuk mempertahankan keamanan nasionalnya, demikian juga Filipina, Thailand, Srilanka dan Inggris.

Dalam konteks Papua teori-teori kritis Ilmu Sosial sudah memberi kerangka akademis yang bisa digunakan untuk menganalisis yang digunakan untuk mengambil keputusan para pimpinan politik. Dari teori-teori kritis itu dan contoh-contoh kasus serupa di berbagai negara bisa diambil pilihan penyelesaian yakni: (1) referendum (2) integrasi politik, sosial, budaya secara demokratis dalam negara Indonesia (3) menjalankan pemerintahan represif di Papua. Ketiga pilihan itu sama sulitnya untuk diwujudkan, tetapi penyelesaian secara demokratis dan damai adalah pilihan yang dianjurkan teori-teori kritis di atas untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan bermartabat, demokratis dan damai bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

Adger, Neil. "Vulnerability". *Journal of Global Environmental Change*. 16 (2006).

Connor, Walker. "Ethnonationalism in the First World: the present in historical perspective", in Milton J. Esman (ed.). *Ethnic Conflict in the Western World*, Ithaca, NY: Cornell University Press. 1967.

----- "A Nation is a Nation, is a State, is an Ethnic Group is a . . .", *Ethnic and Racial Studies*. Vol. 1, No. 4, 1967.

----- "Eco-ethno-nationalism?" *Ethnic and Racial Studies*, Vol. 7. No. 3, (1984).

Cretney, Raven. "Resilience for whom? Emerging critical geographies of socio-ecological resilience". *Geogr Compass* (2014).

Eshel, Yohanan dan Shaul Kimhi. "A New Perspective on National Resilience: Components and Demographic Predictors". *Journal of Community Psychology*, Vol. 44, No. 7. (2016)

Feigenbaum, M. "Quantitative Universality for a Class of Nonlinear Transformations". *Journal of Statistical Physics*. 19. (1). (1978).

Geertz, Clifford. *The Interpretation of Cultures*. New York: Free Press. 1973.

Giay, Benny. "Hai: Motif Pengharapan Zaman Bahagia di Balik Protes Orang Amungme di Timika, Irian Jaya dan Isu HAM". *Deiyai, Majalah Informasi Agama dan Kebudayaan Irian Jaya*, Edisi Perdana September-Oktober. 1995.

----- "Zakheus Pakage and His Communities: Indigenous Religious Discourse, Socio-political Resistance, and Ethnohistory of the Me of Irian Jaya ". PhD Dissertation. Department of Cultural Anthropology / Sociology of Development, Free University, Amsterdam. 1995.

Giblett, Rodney James. *Black Swan Lake: Life of a Wetland*. Bristol-UK: Intellect. 2013.

Hanita, Margaretha. *Cita-cita Koreri, Gerakan Politik Orang Papua*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing. 2019.

Hanita, Margaretha. *Pemikiran Pemikiran Stratejik Intelijen*. Jakarta: Universitas Indonesia Publishing. 2019.

Harff, Barbara dan Ted Robert Gurr. *Ethnic Conflict in World Politics, Dilemmas World Politics*. Westview Press. 2004.

Ho, Peter. *The Challenges of Governance in a Complex World*. World Scientific Publishing Company. 2018.

Jaffrelot, Christophe. *The Hindu Nationalist Movement and Indian Politics, 1925 to the 1990s*. New Delhi: Penguin Books India. 1996.

Kellas, James G. *The Politics of Nationalism and Ethnicity*. St Martin's Press, Inc. 1998.

Kymlicka, Will. *Kewargaan Multikultural, Teori Liberal mengenai Hak-Hak Minoritas*. Jakarta: LP3ES. 2003.

Llobera, Josep R. "Recent Theories of Nationalism". Working Paper No. 164, Institut de Ciències Polítiques i Sosial Barcelona (1999).

Lorenz, Edward. "Deterministic Non Periodic Flow". *Journal of Atmospheric Science*. 20. (1963).

Ponkin, Igor Vladislavovitch. "Black Swan, Event as Manifestation of Uncertainties in Public Administration". *Mediterranean Journal of Social Sciences*. Vol. 10. No. 2 . March 2019.

Ramalingam, Ben, Hazrry Jones, Toussainte Reba dan John Young. "Exploring the science of complexity Ideas and implications for development and humanitarian efforts". Working Paper 285, Foreword by Robert Chambers, (2008). Overseas Development Institute 111 Westminster Bridge Road London SE7 1JD.

Shaw, Paul dan Yuwa Wong. *Genetic Seeds of Warfare: Evolution, Nationalism, and Patriotism*. London: Unwin Hyman. 2009.

Siddiqui, Kalim. "A Critical Study of 'Hindu Nationalism' in India". *Journal of Business & Economic Policy*. Vol. 3, No. 2; June (2016).

Swamy, Arun R. "Hindu Nationalism, What's Religion Got to do with it?" Occasional Paper Series, Asia-Pacific Center for Security Studies (2003).

Synder, Jack. *From Voting to Violence Democratization and Nationalist Conflict*. W. W. Norton & Company. 2000.

Taleb, Nassim Nicholas. *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*. Random House. 2007.

Tarje Aven. "On the meaning of a black swan in a risk context". *Safety Science*. 57, (2013).

Tilly, Charles. *Social Movements 1768–2004*. Boulder, CO :Paradigm Publishers. 2004.

Visser, Leontine E dan Amapon Jos Marey. *Bakti Pamong Praja Papua*,

di Era Transisi Kekuasaan Belanda ke Indonesia. Penerbit Kompas, Jakarta. 2008.

Kilangin, Moses. Uru Me Ki. Penerbit Tabura, Jayapura. 2009.